



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	6 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Rusak Proyek Geothermal Terancam Pidana

KEPOLISIAN Resor (Polres) Serang Kota akan memberikan peninjauan kepada proyek geothermal atau energi panas bumi di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang. Bahkan, jika ada laporan dari pihak perusahaan yang dianggap merusak atau merugikan proyek tersebut, akan dikenakan hukuman pidana.

Hal tersebut terungkap saat sosialisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) di Ruang KH Syam'un, Setda Kabupaten Serang. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Wakil Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Serang Imam Gozali, Kapolres Serang Kota AKBP Firman Afandi, Kodim 0602 Serang, pihak PT Sintesa Geothermal Banten, Camat Padarincang, beserta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Kapolres Serang Kota AKBP Firman Afandi mengatakan, menyikapi masih adanya pro kontra dalam pembangunan proyek geothermal di Padarincang, pihaknya akan melihat undang-undang lebih dulu. Namun, jika ada penolakan yang dilakukan secara anarkis atau merugikan proyek tersebut, pihak perusahaan bisa lapor ke Polres dan akan ditindaklanjuti.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima adanya laporan. "Itu sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Tidak bisa (dijerat hukum) kalau hanya menolak saja, tapi kalau dibarengi anarkis kami harus tunggu laporan perusahaan kalau dirugikan kami ambil tindakan. Hukumannya bisa sampai



DINDIN HASANUDIN/KB

SOSIALISASI PLTB di Ruang Rapat Brigjen KH Syam'un, Setda Pemkab Serang, Kamis (5/9/2019).*

tiga tahun dan denda maksimal Rp 750 miliar, jika terbukti," ujarnya kepada **Kabar Banten** saat ditemui setelah acara.

Ia menuturkan, dalam masalah tersebut, pihaknya menyarankan, agar perusahaan melakukan pendekatan personal kepada mereka yang kontra. Sebab, tidak mungkin jika mereka tidak bisa didekati. "Karena, saya yakin pribadi bisa mendekati ke mereka," ucapnya.

President Director PT Inti Bumi Perkasa (IBP) Dharmizon Piliang mengatakan, selama ini pihaknya selalu mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia menuturkan, akan mengadopsi masukan sebaik apapun dari masyarakat atau dari tokoh tokoh

masyarakat. Sebab, dia ingin, agar program elektrifikasi nasional tersebut mendapat dukungan. "Pastinya pihak perusahaan akan berusaha melakukan yang terbaik, karena perlu diingat kalau itu sudah menjadi pembangkit, maka masyarakat lokal yang menjadi pilarnya di sana. Kayak sekarang saja baru survei, ini baru melihat, tapi itu 70 persen tenaga kerja *nonskil*-nya dari masyarakat setempat, itu sudah dibuktikan, sudah direkrut" tuturnya.

Terkait dengan perizinan, kata dia, semuanya sudah terpenuhi. Ia menargetkan, pada akhir September atau awal Oktober ini dapat segera memulai proses eksplorasi. Adapun luas lahan yang digu-

nakan semuanya ada 1,2 hektare yang berlokasi di wilayah Perhutani. "Kami berusaha meminimalisasi masyarakat terganggu, jadi posisinya di dalam kawasan hutan Perhutani, jalannya juga lewat kawasan hutan Perhutani, hanya ada *crossing* jalan penduduk yang kami lewati, dan itu tetap kami jaga, agar jalan itu tetap bagus," katanya.

Terkait masih adanya sejumlah warga yang menolak, ujar dia, pihaknya membuka ruang untuk komunikasi dengan baik. "Kami tidak mau memaksakan kehendak. Saya juga disarankan untuk silaturahmi, kami akan lakukan itu. Tim semua, baik pak lurah segala macam sudah melakukan komunikasi," ucapnya.

Tokoh Masyarakat Padarincang Tubagus Cecep menyarankan, agar pihak perusahaan terus melakukan sosialisasi, agar tidak terjadi benturan sesama masyarakat. "Sosialisasi sudah sering, mungkin belum mengerti, tapi kami harapkan jangan sampai ada benturan sama masyarakat, yang penting *mah* dari pihak perusahaan silaturahmi lagi, supaya mengerti," tuturnya.

Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, Pemkab Serang mendukung adanya proyek geothermal, karena ini program pemerintah. "Kami ingin ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat kami, dalam hal ini pemda hanya memfasilitasi untuk sosialisasi kepada masyarakat Padarincang," katanya. (Dindin Hasanudin/"KB")**